

Beyond Response: Transformasi Pelayanan Tanggap Bencana yang Cepat, Tangguh, dan Berkelanjutan

Ditujukan kepada:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tim Penulis:

Kemal Hidayah dan Tri Wahyuni (Analisis Kebijakan Pusjar SKPP-LAN)

EXECUTIVE SUMMARY

Policy Brief ini membahas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan tanggap bencana di Indonesia, yang meliputi belum optimalnya kesiapsiagaan bencana, keterbatasan anggaran dan pendanaan, belum memadainya infrastruktur dan sarana prasarana kebencanaan, serta kompleksitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Berdasarkan hasil Survei Pelayanan Tanggap Bencana di Indonesia yang dilakukan oleh Pusjar SKPP LAN terhadap 662 responden dari unsur pemerintah dan masyarakat, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kebencanaan masih memerlukan penguatan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana. *Policy Brief* ini menawarkan empat alternatif kebijakan, yaitu (1) optimalisasi proses kesiapsiagaan bencana melalui penguatan sarana mitigasi, simulasi kebencanaan, *disaster toolkit*, dan literasi kebencanaan; (2) reformasi kebijakan pendanaan melalui penganggaran yang adaptif, percepatan Dana Siap Pakai (DSP), serta pengembangan instrumen pembiayaan jangka panjang; (3) penguatan infrastruktur kebencanaan dan kapasitas sumber daya manusia; serta (4) penguatan tata kelola penanggulangan bencana melalui sistem relawan yang terstruktur dan sistem informasi berbasis data yang terintegrasi. *Policy Brief* ini memberikan rekomendasi agar memperkuat reformasi pendanaan penanggulangan bencana, meningkatkan profesionalisme aparatur, mengembangkan sistem relawan yang berkelanjutan, serta membangun tata kelola penanggulangan bencana yang terintegrasi melalui *Incident Command System* (ICS), *platform data real-time*, dan *dashboard* logistik. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelayanan tanggap bencana yang lebih cepat, tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, mulai dari tahap mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi akibat kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan klimatologis yang dimilikinya. Letak Indonesia pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, keberadaan jalur cincin api (*Ring of Fire*), serta karakteristik iklim tropis menjadikan berbagai jenis bencana, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami, hingga cuaca ekstrem, berpotensi terjadi di berbagai wilayah (BNPB, 2025). Kejadian bencana tersebut tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan pembangunan, stabilitas sosial dan ekonomi, serta kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, serta penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.



Keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat sebagai aktor utama yang berada di wilayah terdampak. Berbagai uraian tersebut memberikan gambaran bahwa penanggulangan bencana merupakan isu yang tidak hanya berkaitan dengan kapasitas kelembagaan pemerintah, tetapi juga erat kaitannya dengan tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan dukungan sarana mitigasi yang tersedia.

Hasil survei dan analisis dalam *policy brief* ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi penyelenggaraan penanggulangan bencana, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 662 responden, yang terdiri atas 498 responden dari unsur pemerintah dan 164 responden dari unsur masyarakat, serta mencakup lima klaster wilayah di Indonesia, yaitu Kalimantan, Sumatra, Papua-Maluku-Nusa Tenggara Timur (NTT)-Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa-Bali, dan Sulawesi, diperoleh gambaran mengenai berbagai tantangan kesiapsiagaan bencana masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian. Identifikasi terhadap persepsi responden menunjukkan bahwa terdapat beberapa isu strategis yang memengaruhi efektivitas upaya penanggulangan bencana, diantaranya:



Kesiapsiagaan Bencana Belum Optimal

Hasil survei menunjukkan bahwa pelayanan tanggap bencana masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada aspek penyediaan informasi kebencanaan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Meskipun sebanyak 77% responden menilai penanganan bencana di daerah telah berlangsung dengan cepat, masih terdapat 23% responden yang menyatakan bahwa penanganan bencana belum berjalan secara optimal. Persepsi tersebut sejalan dengan temuan bahwa 22% responden mengaku belum pernah melihat keberadaan tanda peringatan, larangan, maupun informasi bahaya di kawasan rawan bencana, yang menunjukkan belum meratanya penyediaan informasi risiko sebagai bagian dari pelayanan kebencanaan.



Keterbatasan Anggaran dan Pendanaan Menghambat Optimalisasi Pelayanan Tanggap Bencana

Keterbatasan anggaran dan pendanaan menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan tanggap bencana. Hasil survei menunjukkan bahwa aspek ini merupakan tantangan yang paling dominan dengan 167 responden (34%) menyatakan bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mendukung kegiatan pelayanan tanggap bencana hingga pelayanan pemulihan/pembangunan kembali wilayah terdampak secara optimal. Keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak secara internal organisasi, sepertiminimnya upaya pengembangan kapasitas aparatur dalam mengoperasikan peralatan kebencanaan. Lebih dari itu, keterbatasan anggaran berdampak pada minimnya pelaksanaan kegiatan edukasi atau sosialisasi kebencanaan yang merupakan kebutuhan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah yang berpotensi bencana.



Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Menghadapi Kompleksitas yang Tinggi

Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berperan dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, serta pelayanan publik pascabencana. Hasil survei menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah, sebagaimana diungkapkan oleh 57 responden (11%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemulihan pascabencana belum sepenuhnya mampu berlangsung secara efektif dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh kompleksitas proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga koordinasi antarinstansi. Selain itu, proses pemulihan yang membutuhkan waktu relatif panjang turut menyebabkan percepatan pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat belum berjalan secara optimal.



Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Kebencanaan

Hasil survei juga menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana kebencanaan belum sepenuhnya memadai, baik dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah maupun dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat terjadi bencana. Ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan pelayanan tanggap bencana yang cepat, efektif, dan berkelanjutan.

Temuan survei menunjukkan sebanyak 79 responden (16%) menilai keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kondisi tersebut tercermin dari masih terbatasnya berbagai fasilitas pendukung pelayanan kebencanaan, seperti media center, rumah sakit lapangan beserta prasarana yang terstandar, trauma center, sarana transportasi kebencanaan, serta belum adanya standar pembangunan fasilitas umum yang tahan terhadap risiko bencana.

Di samping itu, berbagai sarana pendukung pelayanan tanggap bencana juga masih belum tersedia secara optimal di berbagai wilayah. Beberapa komponen penting, seperti jalur evakuasi, pedoman titik kumpul, simulasi kebencanaan, *toolkit* bencana, kurikulum kebencanaan, serta peralatan teknis penanggulangan bencana masih terbatas ketersediaannya. Kondisi tersebut juga tercermin pada penyediaan *Early Warning System* (EWS) sebagai salah satu layanan dasar dalam penanggulangan bencana yang belum tersedia secara merata. Bahkan pada beberapa wilayah, satu perangkat EWS masih digunakan untuk menjangkau beberapa kawasan rawan bencana sekaligus.

ALTERNATIF SOLUSI

Sebagai tindak lanjut atas berbagai tantangan yang teridentifikasi, terdapat sejumlah alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan guna memperkuat pelayanan tanggap bencana.

01 Memperkuat Siaga Bencana Terpadu: Sarana, Simulasi, dan Sinergi

Proses kesiapsiagaan bencana memerlukan keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat sebagai fondasi dalam membangun pelayanan tanggap bencana yang efektif. Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah ketersediaan sarana pendukung kesiapsiagaan, seperti jalur evakuasi, pedoman titik kumpul, dan rambu evakuasi. Hingga saat ini, ketiga sarana tersebut masih belum tersedia secara memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, efektivitas pemanfaatannya juga sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan tata cara penggunaannya. Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi menyebabkan sarana yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal ketika bencana terjadi.

Selain penyediaan infrastruktur kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas masyarakat juga perlu diperkuat melalui pelaksanaan simulasi kebencanaan, penyediaan disaster toolkit, dan penguatan pendidikan kebencanaan. Simulasi yang dilakukan secara berkala akan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengambil tindakan yang tepat saat terjadi bencana. Keterbatasan anggaran banyak menjadi alasan bagi penyediaannya. Kolaborasi dengan pihak swasta (melalui TJSL) dan menghimpun partisipasi masyarakat dapat dijadikan media untuk pengadaannya, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan risiko bencana yang tinggi. Pada aspek pendidikan, penguatan literasi kebencanaan dapat dilakukan melalui integrasi materi kebencanaan ke dalam berbagai mata pelajaran, sehingga pemahaman mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan dapat ditanamkan secara lebih luas dan berkelanjutan sejak usia dini.

02 Penetapan Skala Prioritas Penganggaran dan Reformasi Kebijakan Pendanaan Kebencanaan

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan penganggaran tanggap bencana yang bersifat asimetris, khususnya bagi daerah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Pendekatan tersebut diperlukan agar alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kerawanan wilayah, sehingga kapasitas daerah dalam menyelenggarakan pelayanan tanggap bencana menjadi lebih optimal. Kebijakan tersebut juga perlu didukung oleh penyederhanaan mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban keuangan yang tetap akuntabel, namun lebih adaptif terhadap kondisi kedaruratan, sehingga tidak menghambat kecepatan pengambilan keputusan dan penyaluran pembiayaan pada saat bencana terjadi. Selanjutnya, sistem pembiayaan penanggulangan bencana perlu diarahkan menjadi lebih adaptif dan responsif melalui percepatan mekanisme penyaluran Dana Siap Pakai (DSP), serta pengembangan instrumen pembiayaan jangka panjang, seperti *catastrophe bond* dan *Pooling Fund* Bencana. Langkah tersebut penting untuk membangun sistem pendanaan yang mampu menjamin keberlanjutan pelayanan kebencanaan, mulai dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. *World Bank* menegaskan bahwa penerapan *Disaster Risk Financing* memungkinkan pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang lebih siap dalam menghadapi bencana, sehingga respons dan pemulihan pascabencana dapat dilaksanakan secara lebih cepat tanpa mengganggu stabilitas fiskal maupun keberlangsungan agenda pembangunan.

03 Membangun Infrastruktur Kebencanaan yang Tangguh dan Adaptif

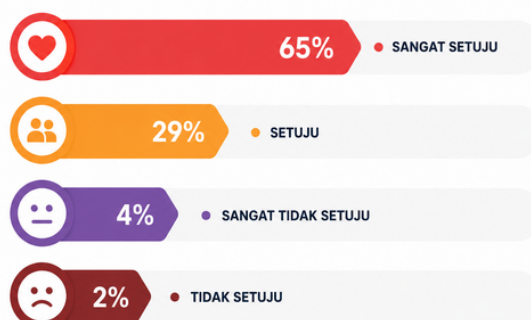
Pembangunan di wilayah rawan bencana perlu menerapkan prinsip ketahanan terhadap risiko bencana melalui penggunaan desain bangunan yang tahan bencana, material konstruksi yang sesuai standar, serta teknologi yang ramah lingkungan. Bangunan milik pemerintah perlu menjadi prioritas agar tetap dapat difungsikan sebagai pusat pelayanan dan penanganan darurat ketika bencana terjadi. Untuk mendukung implementasinya, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, asosiasi profesi, komunitas, dan sektor swasta dalam penyediaan teknologi, inovasi, maupun pembiayaan. Selain itu, penyediaan prasarana utilitas dasar, seperti generator listrik dan tangki air bersih, perlu diprioritaskan di wilayah rawan bencana guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Ketersediaan prasarana tersebut harus diiringi dengan pemeliharaan secara berkala agar tetap berfungsi optimal pada saat kondisi darurat. Penguatan infrastruktur juga perlu didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam menjamin efektivitas penyelenggaraan pelayanan kebencanaan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara berkelanjutan, pengembangan mekanisme *cascading knowledge*, serta penguatan *knowledge management system* sebagai sarana berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik antarpengelola bencana.

04 Penguatan Sistem Relawan yang Terstruktur

Hasil survei menunjukkan masyarakat memiliki modal sosial yang sangat kuat dalam mendukung penanggulangan bencana. Sebanyak 94% responden menyatakan bersedia terlibat dalam penanggulangan bencana, yang terdiri atas 65% responden menyatakan sangat setuju dan 29% responden menyatakan setuju untuk berpartisipasi apabila terjadi bencana. Tingginya tingkat partisipasi tersebut merupakan potensi strategis yang perlu dioptimalkan melalui pengembangan sistem relawan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan Relawan Tanggap Bencana Berbasis Kelurahan (RTBBK), penerapan sistem registrasi relawan secara digital dan terpadu, penyelenggaraan pembinaan serta pelatihan secara berkelanjutan, serta penyediaan mekanisme insentif untuk menjaga keberlanjutan partisipasi relawan. Dengan sistem relawan yang terorganisasi, potensi masyarakat dapat dimobilisasi secara lebih cepat, terkoordinasi, dan adaptif untuk mendukung pelayanan tanggap bencana pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Di sisi lain, penguatan tata kelola penanggulangan bencana perlu diarahkan pada pembangunan sistem yang terintegrasi dengan dukungan data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan *Incident Command System* (ICS) secara terpadu, pengembangan *platform* data *real-time*, penguatan diskresi komando lapangan, serta penyediaan dashboard logistik yang mampu menyajikan informasi mengenai ketersediaan, kebutuhan, dan distribusi bantuan secara transparan. Integrasi sistem informasi tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya frekuensi kejadian bencana yang menuntut proses koordinasi, pengambilan keputusan, mobilisasi sumber daya, dan penyaluran bantuan dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

JIKA TERJADI BENCANA, SAYA AKAN TURUT MEMBANTU PENANGGULANGAN BENCANA (MASYARAKAT)



REKOMENDASI

NO	REKOMENDASI KEBIJAKAN	LANDASAN TEMUAN SURVEI	PRIORITAS
R1	Reformasi pendanaan: mandatory spending, percepatan DSP, dana abadi catastrophe bond	38% sebut anggaran sebagai tantangan utama; program preventif rentan dipotong efisiensi.	ST
R2	Profesionalisasi SDM: sertifikasi wajib, cascading knowledge, knowledge management system	22% tanpa pelatihan berkala; 34% saran fokus SDM, masalah rotasi pegawai.	ST
R3	Sistem relawan terstruktur: RTBBK, registrasi digital terpadu, insentif relawan	94,5% siap membantu; masyarakat minta pos relawan per kelurahan.	T
R4	ICS terpadu, platform data real-time, diskresi komando lapangan, dashboard logistik publik	Koordinasi lemah; data tidak sinkron; masyarakat minta transparansi & golden time.	T
R5	Standardisasi tanda peringatan, EWS multi-kanal, peta digital publik, pengaduan alat prioritas	22% masyarakat tak pernah lihat tanda bahaya; EWS hanya 165/498 instansi.	MT
R6	Kebijakan afirmatif kepulauan & 3T: gugus pulau, DAK khusus, pre-positioning logistik	Wilayah kepulauan hadapi tantangan berlapas, tidak terakomodasi kebijakan umum.	T

ST SANGAT TINGGI hambatan struktural terbesar

T TINGGI efisiensi tinggi, biaya relatif rendah

MT MENENGAH TINGGI butuh investasi infrastruktur

Policy Brief ini memberikan enam rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Prioritas utama diarahkan pada reformasi kebijakan pendanaan penanggulangan bencana melalui penguatan mandatory spending, percepatan Dana Siap Pakai (DSP), serta pengembangan instrumen pembiayaan jangka panjang seperti *catastrophe bond*. Selain itu, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia perlu dilakukan melalui sertifikasi kompetensi, *cascading knowledge*, dan *knowledge management system* guna meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selanjutnya, pemerintah perlu mengembangkan sistem relawan yang terstruktur melalui pembentukan Relawan Tanggap Bencana Berbasis Kelurahan (RTBBK), registrasi digital, pembinaan berkelanjutan, dan pemberian insentif. Sistem penanggulangan bencana berbasis data juga perlu diperkuat melalui penerapan *Incident Command System* (ICS), dalam implementasinya, sistem ini perlu diperkuat melalui kebijakan diskresi komando agar pengambilan keputusan di lapangan dapat dilakukan secara lebih cepat, responsif, dan adaptif pada situasi kedaruratan. Selain itu, pengembangan dashboard logistik publik perlu menjadi bagian dari sistem informasi penanggulangan bencana untuk mendukung pemetaan kebutuhan, pemantauan rantai pasok, ketersediaan logistik, serta transparansi pengelolaan bantuan secara real-time, sehingga proses tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih efektif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.bnpb.go.id/index.php/berita/bnpb-gelar-bimtek-peningkatan-sdm-pengoperasian-peralatan-dan-pergudangan-penanggulangan-bencana>
- <https://www.worldbank.org/en/programs/disaster-risk-financing-and-insurance-program>
- <https://www.idxchannel.com/news/anggaran-bnpb-kena-efisiensi-rp4709-miliar-penanganan-bencana-dipastikan-tak-terganggu>
- <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-tangguh-menghadapi-bencana-2025>
- <https://news.detik.com/berita/d-8526008/bnpb-1-051-bencana-terjadi-di-indonesia-hingga-pertengahan-2026>
- <https://www.bnpb.go.id/informasi-bencana/buletin-info-bencana-april-2026>